

## **DAFTAR PUSTAKA**

Buku :

Aslan Noor, "KONSEPSI HAK MILIK ATAS TANAH BAGI BANGSA INDONESIA DITINJAU DARI AJARAN HAK ASASI MANUSIA", Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung, 2003.

Hartono Hadisoerapto,(1982) *Pengantar Hukum Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, h. 30

Iman Soetiknjo, (1994) *Politik Agraria Nasional*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, , hlm. 54.

I Wayan Suandra,. 1996. *Masalah Hak Atas Tanah, Pembebasan Tanah dan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*. Bandung: Citra Adtya Bakti.

J Supranto, *Metode Penelitian Hukum Dan Statistik* (Jakarta: Pt. Rineka Cipta, 2003)

Jimly Asshiddiqie. (2016). *Konstitusi Ekonomi*. Jakarta: Kompas

Marulak Togatorop, 2020, *Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Yogyakarta,

Ndraha, Taliziduhu, 2003. *Kybernetology (Ilmu Pemerintahan Baru)*, Jakarta: Rineka Cipta.

Noor M, Abd. Rahman., 1997, *Penilaian Harta Tanah*, Program Kerjasama BPLK dengan ITM Mura Malaysia, Malang. p. 125.

Oloan Sitorus 2004. *Pelepasan atau Penyerahan Hak atas Tanah Sebagai Cara Pengadaan Tanah*. Jakarta: Cetakan Pertama. Dasamedia Utama.,

Oloan Sitorus dan Dayat Limbong, *Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, Mitra Kebijakan Tanah*, Yogyakarta, 2004, hal.1

Pamuncak, Aristya Windiana, 2016. *Perbandingan Ganti Rugi dan Mekanisme Peralihan Hak Menurut Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012*, Jurnal Law and Justice, 1 (1): 1-8.

Ronald Z. Titahelu, "Penetapan Asas-asas Hukum Umum dalam Penggunaan Tanah Untuk Sebesar-besar Kemakmuran Rakyat, Suatu Kajian Filsafati dan Teoritik tentang Pengaturan dan Penggunaan Tanah di Indonesia", Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 1993.

Soerjono Soekanto And Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Press, 2013).

Jurnal :

Adhi, H. I., Subiyanto, S., & Wijaya, A. P. (2015). PEMETAAN ZONA NILAI TANAH UNTUK MENENTUKAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK (NJOP) MENGGUNAKAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS. *Jurnal Geodesi UNDIP*, 4(3), 66-77. Retrieved from <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/geodesi/article/view/8960>

Djanggih, H., & Salle, S. (2017). Aspek Hukum Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum. *Pandecta Research Law Journal*, 12(2), 165-172.

Hermanto Siregar, "Politik Dan Kebijakan Penilaian Tanah Dan Aset Pertanahan" disampaikan dalam Workshop Nasional Politik, Arah, dan Kebijakan Penilaian Tanah dan Aset Pertanahan, Jakarta: 20-30 Nopember 2007.

Mujiburohman, D. A., & Kusmiarto, K. (2014). Aspek Hak Asasi Manusia dalam Pengadaan Tanah. *Bhumi Jurnal Ilmiah Pertanahan PPPM-STPN*, Nomor 40 tahun 13, 621-632.

Tanuramba, R. R. (2020). Legalitas Kepemilikan Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat Menurut Hukum Agraria. *Lex Privatum*, 7(5).

Tenong, S., Maroa, M. D., & Setiawan, R. (2021). *Tinjauan Yuridis Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021*. *Jurnal Yustisiabel*, 5(2), 194-210.

R.F. Saragih, "Fungsionalisasi ADR dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup", Jurnal Hukum, Vol. 7 No. 13, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2000, h. 140-142.

Schmid, A.A. 1988, "The Impact of Population an Values of Developed Lots For Single Family House In The United State. Journal of Urban Economics ", Vol. 7. No. 2. p. 25-31.

Shengkel William M, 1988,Modern Real Estate Appraisal, Mc Graw Hill, p. 31  
Subekti, R. (2016). *Kebijakan Pemberian Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*. *Yustisia Jurnal Hukum*, 5(2), 376-394.

Pearce, David W., and Turner Kerry R, 1990, *Economics Of Natural Resources and The Environment*, The John Hopkins University, Baltimore.p. 78.

Supriyanto, 2008. Implementasi Kebijakan Pertanahan Nasional, *Jurnal Dinamika Hukum* 8 (3): 221:231.

Santoso, Urip, 2012. Eksistensi Hak Pengelolaan Dalam Hukum Tanah Nasional, *Jurnal Mimbar Hukum* 24 (2): 275:375

Widyarini, I. W. (2016). *Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum*. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 4(2).

Zarkasih, H. (2015). *Pelaksanaan prinsip keadilan dalam pemberian ganti rugi pengadaan tanah untuk kepentingan umum (studi kasus pelebaran jalan raya di Kota Praya Kabupaten Lombok Tengah)*. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 3(2).

#### Skripsi/Disertasi:

Ida Nurlinda, "Penyelesaian Sengketa dan/atau Konflik Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Makalah Seminar Nasional Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 2 Tahun 2012, Program Pascasarjana, Universitas Airlangga, Surabaya, 27 November 2012, h. 8.

Irene Eka Sihombing, Budaya Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan. Dalam Pergulatan Pemikiran dan Aneka Gagasan Seputar Hukum Tanah Nasional, Suatu Pendekatan Multidispliner. Kumpulan Tulisan Dalam Rangka Memperingati 60 Tahun Prof. Aries Sukanti Hutagalung. Badan Penerbit FHUI, 2011, hlm 159.